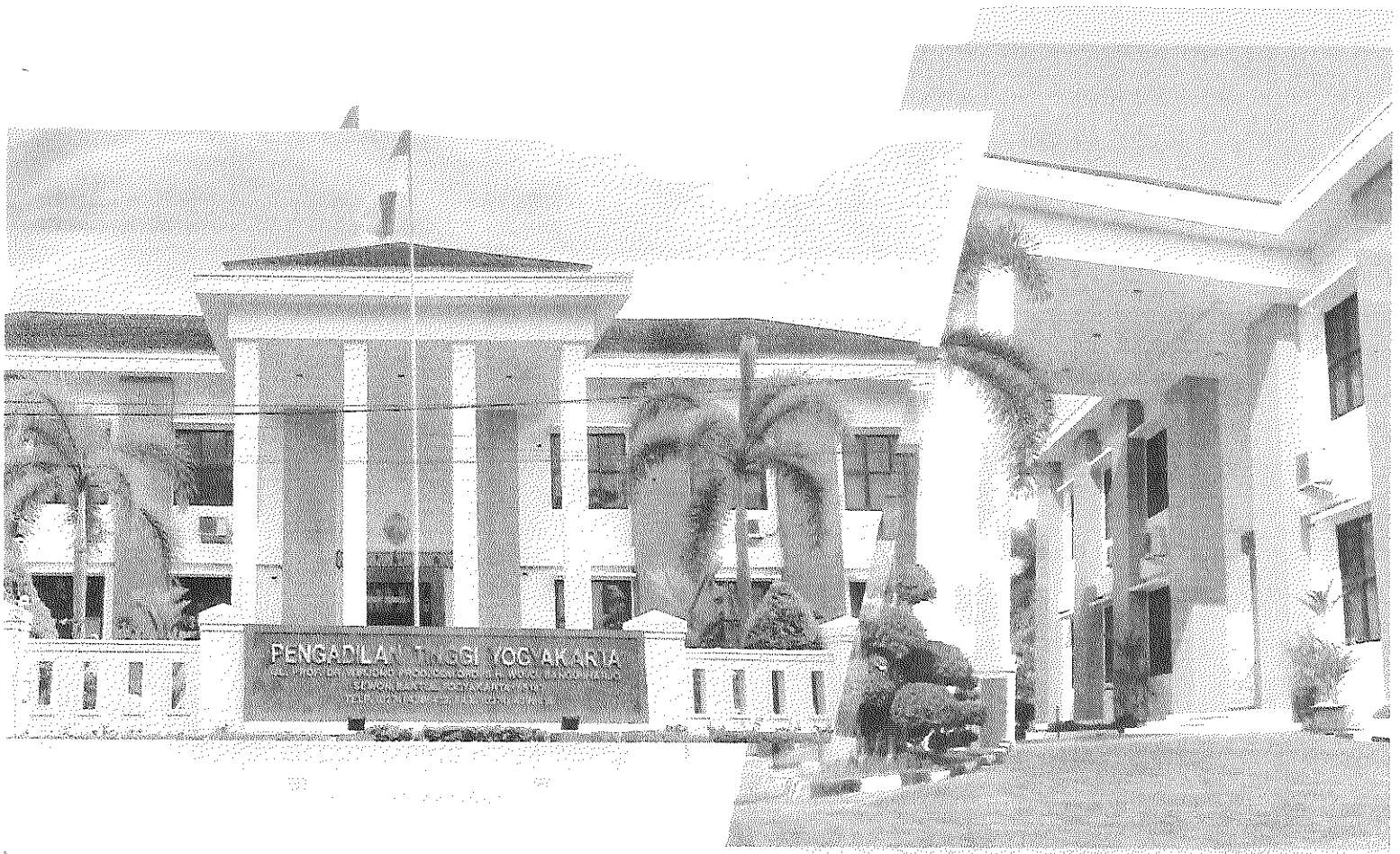


LAPORAN MONITORING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tanggal 10 Januari 2020



Susunan Tim :
1. Sagimin, S.H.,M.M.
2. Erwan Hermawan, S.Kom.

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396 412, Fax. (0274) 4396 415, Email: pt.yogya@gmail.com
Website: www.pt-yogyakarta.go.id

BAB I PENDAHULUAN

I.1. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
3. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/1/ST/KPT/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.

I.2. TUJUAN

1. Melihat tindak lanjut atas temuan/catatan dari Tim Pendampingan ZI Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebelumnya.
2. Mendorong Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sehingga dapat diusulkan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas predikat WBK pada Tahun 2020.

I.3. METODE

1. Pemeriksaan LKE dan Eviden.
2. Pemeriksaan lapangan / observasi.
3. Pendampingan dan diskusi.

I.4. SUSUNAN TIM

| No | Nama | NIP | Pangkat / Gol. | Jabatan |
|----|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Sagimin. SH..MM | 19600109 198703 1 005 | Pembina Tingkat I - IV/b | Sekretaris |
| 2. | Erwan Hermawan. S.Kom. | 19850416 200904 1 002 | Penata -- III/c | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan TI |

I.5. WAKTU PELAKSANAAN

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu Jumat, 10 Januari 2020.

BAB II
HASIL MONITORING

II.1. TINDAK LANJUT TEMUAN SEBELUMNYA

| NO | TEMUAN / KEKURANGAN (10 Oktober 2019) | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|
| 1 | <p>AREA I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Daftar Riwayat Hidup anggota Tim Pembangunan ZI 2. SK Tim untuk memberntuk Tim Pembangunan ZI belum diberi nomor 3. Notulen Rapat Tim untuk membentuk Tim Pembangunan ZI sebaiknya diperbaiki dan diperdetail pokok bahasannya dan kesimpulan rapat dengan menyebutkan rancangan Tim Pembangunan ZI 4. SK Penetapan Rencana Kerja belum diberi nomor 5. Dokumen rencana kerja belum ada target capaian 6. Matriks rencana kegiatan / jadwal kegiatan tim kerja, belum di highlight atau ditentukan rencana waktu pelaksanaannya 7. Target prioritas pada point 2.b sebaiknya juga ada dalam 1 (satu) dokumen pada rencana kerja 8. Liputan Pencanaan Pembangunan ZI dalam media website sebaiknya dalam bentuk screenshot bukan copy paste text/image 9. Pencanaan Pembangunan ZI belum ada eviden liputan pada website Pengadilan Negeri Bantul 10. Notulen tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI sebaiknya ditambahkan detail pokok bahasannya serta disinkronkan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi sebelumnya 11. Belum dilengkapi dengan Presensi Fingerprint Pimpinan | <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> |

| NO | TEMUAN / KEKURANGAN (10 Oktober 2019) | TINDAK LANJUT |
|----|---|---|
| | 12. Dokumentasi foto rapat pemilihan agen perubahan belum diberi Juduk 13. Sebaiknya dilengkapi Dokumen Kegiatan Rohani 14. Dokumen Pakta Integritas sebaiknya dilengkapi dokumentasi Acara Penandatanganan Pakta Integritas 15. Banner komitmen bersama yang ada pada area lain juga dimasukkan pada Area I serta belum dilengkapi Foto Penandatanganan Komitmen Bersama 16. Belum dilengkapi Dokumen Kegiatan Rohani, Kegiatan Olahraga dan lain-lain yang ada kaitannya dengan keterlibatan semua unsur dalam Pembangunan ZI | Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti |
| 2 | AREA II 1. Dokumentasi rapat tim penyusunan peta bisnis dan sosialisasi peta bisnis belum didokumentasikan 2. Sampling penerapan SOP belum didokumentasikan 3. SK Penunjukan Tim Revisi SOP belum didokumentasikan di Area II 4. Perbandingan antara SOP yg belum dan sesudah revisi 5. Dokumen sudah lengkap hanya masalah pemisahan pendokumentasian 6. Dokumen sudah lengkap hanya masalah pemisahan pendokumentasian 7. SK Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP belum didokumentasikan di Area II 8. Leaflet Pelayanan, SOP Terkait Pelayanan, Screenshot Web, Screenshot DIPA Di Web Belum Didokumentasikan 9. Laporan Tahunan Informasi belum ada | Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah mulai ditata Sudah mulai ditata Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti |

| NO | TEMUAN / KEKURANGAN (10 Oktober 2019) | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|
| 3 | <p>AREA III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Rapatnya sebaiknya di bendel jadi 1 (satu) dengan hasil analisis 2. Penghitungan waktu dalam ABK perlu di perbaiki 3. Dokumen Seleksi Tenaga Honorer belum dilengkapi Foto Pelaksanaan Seleksi Tenaga Honorer dan SK Pengangkatan Tenaga Honorer 4. Rapat Evaluasi Tenaga Honorer Triwulan III belum disajikan 5. Foto rapat baperjakat sebaiknya diperbaiki dengan foto sebenarnya dan diberi Judul Kegiatan 6. Belum ada Hasil <i>Training Need Analysis</i> / Analisa Kebutuhan Pelatihan yang dilakukan 7. Belum ada dokumen Bimbingan Teknis yang dilakukan 8. Belum ada Usul Diklat Bendahara, Peserta FGD, Diklat PIM dan Diklat lainnya 9. Belum ada Dokumen DDTK (Diklat Di Tempat Kerja). mentoring yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul 10. Belum disajikan contoh Perjanjian Kinerja Individu secara berjenjang ke level di atasnya 11. Monev Uraian Tugas Pegawai (per 6 bulan) yang telah dilakukan sebaiknya ditambahkan kuantitas capaian kinerjanya. Monev kinerja bisa diagendakan rapat monev kinerja 12. Bentuk pemberian reward belum disajikan, antara lain: Usul Promosi Jabatan, Pemberian Satya Lencana, dan lain-lain 13. Penegakkan aturan disiplin belum dilengkapi : Foto Apel, Printout absensi finger, Printout daftar hadir di komdanas, Ijin pulang awal, cuti 14. Pengelolaan Dokumen SIKEP belum terupdate seluruhnya, sebaiknya sebelum dan sesudah update di screenshot untuk | <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti</p> |

| NO | TEMUAN / KEKURANGAN (10 Oktober 2019) | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|
| | <i>dijadikan eviden</i> | |
| 4 | AREA 4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan belum lengkap | Sudah ditindaklanjuti |
| 5 | AREA 5 <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian resiko belum dibuat 2. Belum ada notulen sosialisasi SPI 3. Formulir pengaduan belum ada 4. Belum ada Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan | Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti |
| 6 | AREA 6 <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan PTSP sudah dibuat namun secara konten harus diteliti kembali karena masih ada jenis layanan yang bukan merupakan tupoksi PN Bantul. 2. Sistem reward n punishment hanya dibuat untuk petugas PTSP saja, sebaiknya untuk seluruh Hakim, ASN, dan honorer 3. SK Pembentukan Tim Survei sebaiknya diperbaiki dengan memperhatikan tenggang waktu tahapan pelaksanaan survei, 4. Lampiran laporan SKM sebaiknya dilengkapi dengan analisa penghitungan data, sampel kuesioner, tim survei, dll 5. Rapat Tim Survei dalam rangka evaluasi hasil SKM belum didokumentasikan 6. Sosialisasi hasil SKM belum didokumentasikan | Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti Laporan SKM belum ada Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti |

II.2. TEMUAN

1. Masih ditemukan Surat Pernyataan Sekretaris terdahulu, Wiratno, SH, yang menerangkan bahwa tidak ada pengaduan sehingga tidak ada materi untuk di monev, tidak Ada Resiko, tidak ada materi untuk monev pemanfaatan teknologi informasi, operasionalisasi SDM, pemberial layanan dan yang sejenisnya sebaiknya dikeluarkan. (terlampir).
2. Penempatan biaya layanan tidak di ruang publik.
3. Penempatan *Charge Station* tidak di ruang publik.
4. Eviden pada Komponen Hasil termasuk Laporan Survei belum ada.

BAB III

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

1. Pada umumnya, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bantul sudah mengalami peningkatan yang signifikan, penataan dokumen *hardcopy* sudah rapi, *softcopy* sudah tersimpan dalam struktur direktori yang mudah dipahami sesuai dengan LKE.
2. Unsur yang menjadi persyaratan utama pengajuan predikat WBK telah terpenuhi, antara lain:
 1. Nilai Penilaian Mandiri LKE Zona Integritas : 88,35
 2. Survei Kepuasan Masyarakat Semester II 2019 : 86,50
 3. Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester II 2019 : 3,67
 4. Nilai LKjIP Tahun 2018 : BB (77,35)
 5. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu : A "Excellent"

IV.2. SARAN

1. Berdasarkan hasil Kunjungan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB dalam rangka Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 4 November 2019 terdapat catatan bahwa pelayanan dan fasilitas publik sebaiknya di lantai 1 termasuk ruang sidang yang terletak di lantai 2, ruang laktasi di lantai 2, sebaiknya jika memungkinkan:
 1. Ruang Sidang Anak yang terletak di lantai 2, dipindahkan ke lantai 1.
 2. Sterilisasi ke lantai 2 lebih ditingkatkan, antara lain dengan pembatasan akses ke lantai 2.
 3. Sterilisasi ke ruangan masing-masing sub / bidang lebih ditingkatkan.
2. Dibuat pos satpam dan pagar otomatis masuk/keluar gedung kantor.
3. Dibuat jalur disabilitas mulai dari pagar masuk gedung kantor.
4. Dibuat Pojok *E-Court* untuk layanan *E-Court*.
5. Penerimaan Surat Masuk sebaiknya langsung dilayani di PTSP.
6. Banner-banner layanan ataupun *Public Compign* yang ada di ruang publik sebaiknya ditata kembali agar lebih rapi dan mudah dibaca.
7. *Charge Station* yang semua terletak di belakang sekat ruang publik, sebaiknya dipindahkan ke ruang publik.
8. Biaya layanan yang tertempel di kepaniteraan perdata, sebaiknya dipindahkan ke ruang publik.
9. Penamaan direktori penyimpanan *E-Doc Zi*, sebaiknya tidak terlalu panjang agar tidak melebihi batas 260 karakter sehingga menyebabkan tidak bisa diakses.
10. Eviden pada Komponen Pengungkit sudah disajikan dengan rapi, namun sebaiknya juga disajikan Eviden pada Komponen Hasil.

11. Hasil scan yang memuat screenshot aplikasi terlihat kurang jelas, sebaiknya langsung di simpan pdf dari Ms Word.
12. LKE ZI sebaiknya diberi link ke E-Doc untuk memudahkan pengaksesan.
13. Pada Area V – Point 3 (Pengaduan Masyarakat) terdapat Surat Pernyataan Sekretaris bahwa tidak ada pengaduan sehingga tidak ada materi untuk di monev, sebaiknya dikeluarkan dari dokumen ZI.
14. Masing-masing Koordinator Area harus menguasai Eviden di Area-nya dan agar mempersiapkan materi untuk paparan ketika penilaian oleh Tim Penilai Internal ZI dari Bawas MA RI.
15. Disiapkan materi-materi secara umum untuk paparan dengan Tim Penilai Internal ZI dari Bawas MA RI ataupun Tim Penilai Nasional ZI dari Kementerian PAN dan RB, antara lain:
 1. Statistik 3 tahun atau 3 periode terakhir:
 - a. Peningkatan penyelesaian perkara
 - b. Peningkatan nilai LKjP
 - c. Peningkatan Realisasi Anggaran
 - d. Penurunan Pengaduan
 - e. Peningkatan nilai Survei Kepuasan Masyarakat
 - f. Peningkatan nilai Survei Indeks Persepsi Korupsi
 2. Progres pembangunan Zona Integritas yang memuat *Before* dan *After* Zona Integritas.
 3. Inovasi-inovasi layanan.
 4. Video Profil (Pembangunan Zona Integritas).
 - a. Video Testimoni dari Instansi Terkait ataupun Pengguna Layanan

Demikian laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bantul disusun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Yogyakarta, 10 Januari 2020

Tim Monitoring ZI



Sagimin, SH, MM

NIP. 19600109 198703 1 005

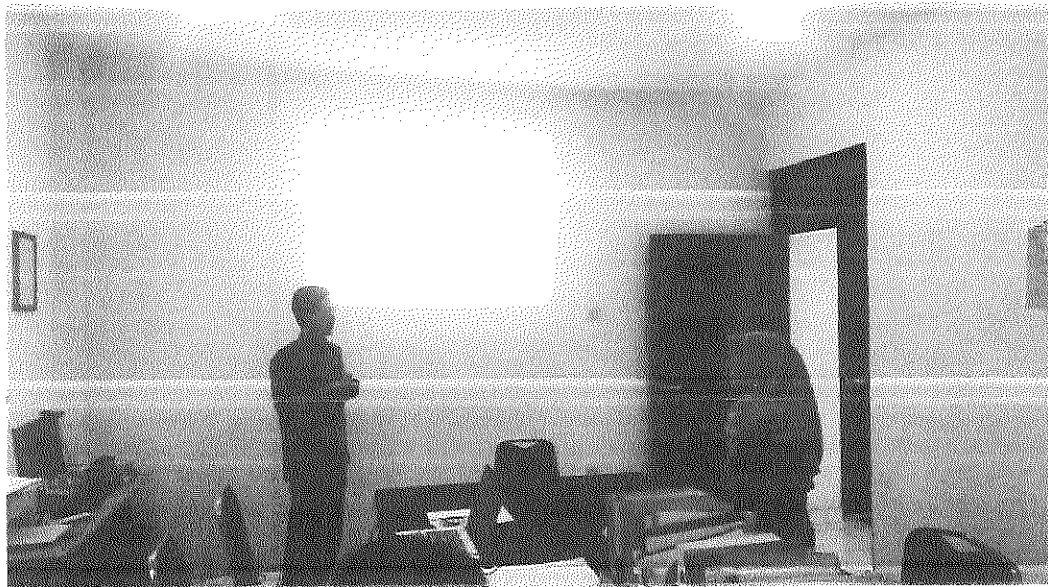


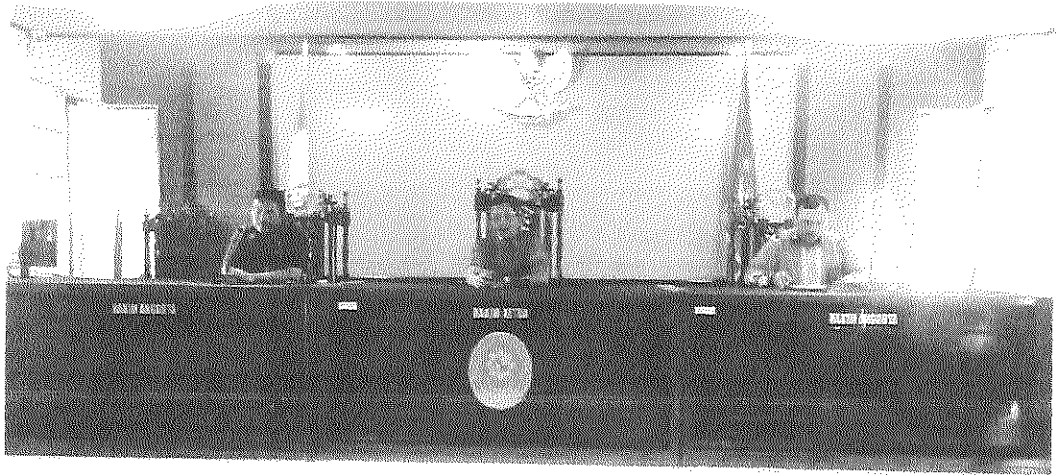
Enan Hermawan, S.Kom

NIP. 19850416 200904 1 002

Lampiran

FOTO
MONITORING DAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TANGGAL 10 JANUARI 2020







PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul

Telp./Fax : (0274) 367348

Email : pn_bantul@yahoo.co.id.

website : <http://www.pn-bantul.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRATNO, SH
NIP : 197202131993031002
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul sehingga tidak ada materi untuk dilakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul, 11 Oktober 2019

Sebelumnya

WIRATNO, SH

NIP. 197202131993031002



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soesanto, SH No.34 Bantul

Telp/Fax : (0274) 367340

Email : pn.bantul@pn.go.id

Website : <http://pn.bantul.pn.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRATNO, SH
NIP : 197202181993031002
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka proses pemberian layanan kepada publik oleh Pengadilan Negeri Bantul, sehingga tidak ada materi untuk dilakukan monitoring dan evaluasi atas aparat pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul, 06 Oktober 2019
Sekretaris

WIRATNO, SH
NIP. 197202181993031002



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396 412, Fax. (0274) 4396 415
Website : www.pt-yogyakarta.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : W13-U/ I /ST/KPT/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIPTO
NIP : 19541005 198103 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama – IV/e
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Dengan ini menugaskan kepada :

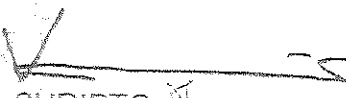
| No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1 | Sagimin. S.H., M.M. | 19600109 198703 1 005 | Pembina Tingkat I - IV/b | Sekretaris |
| 2 | Erwan Hermawan, S.Kom. | 19850416 200904 1 002 | Penata - (III/c) | Staff |

Untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan zona integritas ke Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 10 Januari 2020.

Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 9 Januari 2020
Ketua


SURIPTO

Tembusan Yth. :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3. Petugas Presensi Pengadilan Tinggi Yogyakarta